



Strategi Ketahanan Pangan Dimasa Pandemi Covid-19: Penguatan Potensi Desa Melalui *Sustainable Farming* di Indonesia

Food Security Strategy In The Pandemic Time Covid-19: Strengthening Village Potential Through Sustainable Farming in Indonesia

Tasya Adhila Amalia¹, Jordan Aria Adibrata², Riko Ratna Setiawan³

^{1,2} Program Studi Hubungan Internasional, ³ Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang

*Kontak penulis: jordanaria2@gmail.com

Abstract

This paper aims to explain how the government should be able to optimize the villages from a policy perspective in order to achieve sovereignty in the agricultural sector, and make it an alternative strategy of high significance during a pandemic. This is because so far the village has not become the main actor in achieving national food security, even though this unit has various potentials that can be developed through the principle of sustainable farming. As a result, the case study of the use of the Peatland Project (PLG) in the Food Estate program in the era of the Joko Widodo administration is a form of inefficiency because it has to go through a long process so that optimal results will only make Indonesia slow to prepare to face the world food crisis. Optimizing villages with the empowerment of the crop rotation method can provide significant changes in strengthening food through quality production and can reduce Indonesia's dependence on imports. This certainly shows that sustainable farming through village optimization can improve community welfare.

Keywords: Food security; Peatland Project (PLG); Sustainable Farming; Village

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana seharusnya pemerintah dapat mengoptimalkan desa dari sisi kebijakan demi tercapainya kedaulatan di sektor agrikultur, dan menjadikannya sebagai strategi alternatif yang memiliki signifikansi tinggi dalam masa pandemi. Pasalnya selama ini desa belum menjadi aktor utama dalam mencapai ketahanan pangan nasional, padahal unit tersebut memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan melalui prinsip *sustainable farming*. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan menggunakan sumber data sekunder melalui studi literatur dan dokumentasi. Sebagai hasil, studi kasus pemanfaatan Proyek Lahan Gambut (PLG) pada program *Food Estate* di era Pemerintahan Joko Widodo merupakan sebuah bentuk ketidakefisienan karena harus melalui proses yang panjang agar hasilnya optimal hanya akan menjadikan Indonesia lamban untuk kesiapan menghadapi krisis pangan dunia. Optimalisasi desa dengan pemberdayaan metode *crop rotation* dapat menyuguhkan perubahan yang signifikan akan penguatan pangan melalui produksi berkualitas serta dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa *sustainable farming* melalui optimalisasi desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Desa; Ketahanan Pangan; Proyek Lahan Gambut (PLG); *Sustainable Farming*.

1. Pendahuluan

Ketahanan pangan menjadi isu kontemporer yang terkadang dianggap sebelah mata namun pada kenyataannya memiliki signifikansi tinggi ketika masa krisis. Secara akademis, isu ketahanan pangan merupakan pendekatan yang bersifat multidisipliner, yang memerlukan beragam sudut pandang untuk menganalisa permasalahan tersebut mulai dari ekonomi, sosial, politik, budaya, hingga lingkungan (Maharani, 2016). Sektor politik kerap memiliki dominansi karena melalui hal tersebutlah proses *decision making* terjadi untuk mengatasi dan mengelola isu permasalahan diatas melalui kebijakan yang dibuat. Namun ketahanan pangan tidaklah sebatas menjadi isu lokal, tetapi merupakan isu global yang membutuhkan kerja sama dari banyak aktor untuk sama-sama mengatasi problema tersebut.

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 hingga kini membuat dunia kian rentan dalam berbagai sektor, mulai dari kesehatan hingga sektor pangan. Berdasarkan data dari FAO, sebanyak 27 negara mengalami ancaman krisis pangan ditengah pandemi yang disebabkan oleh berhentinya perputaran sektor ekonomi, tidak adanya bantuan humaniter, serta sistem pangan yang mengalami pukulan dampak yang berat (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2020). Diantara puluhan negara tersebut, Ethiopia, Mozambik, dan Nigeria menjadi negara yang paling rentan dengan 56 juta jiwa terkena krisis pangan akut, dan 1.5 miliar jiwa secara global terancam terkena dampak tersebut (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2020). Dampak yang diperkirakan dari adanya krisis pangan tersebut adalah meluasnya tindak kekerasan baik antar individu atau kelompok, terjadinya krisis ekonomi makro yang berdampak pada tidak stabilnya kondisi sosio-ekonomi, serta skenario yang paling parah yakni terjadinya kelaparan. Gambaran diatas menunjukkan bahwasannya masalah ketahanan pangan tidak hanya menyangkut level individu saja, namun juga berpengaruh pada sistem negara serta global secara luas.

Maka dari itu, pada April 2020 lalu FAO mengeluarkan himbauan bagi negara di dunia agar menjadikan isu ketahanan pangan sebagai salah satu fokus yang perlu diperhatikan selain memerangi pandemi itu sendiri (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2020). Faktor seperti disrupsi rantai pasokan pangan yang disebabkan oleh adanya kebijakan *lockdown* menjadi salah satu alasan utama FAO memproyeksikan jika adanya penyumbatan jaringan tersebut dapat menyebabkan krisis pangan secara global. Terhambatnya perdagangan internasional juga menjadi faktor lain yang digarisbawahi karena situasi pandemi menyebabkan terjadinya hal tersebut, dan menghimbau agar negara-negara dapat mengupayakan ketersediaan dan kelancaran rantai pasokan pangan nasional mereka. Menanggapi hal tersebut, Indonesia meresponsnya melalui tindakan yang bersifat preventif dengan cara berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk memastikan keamanan pasokan pangan nasional (Yuliawati, 2020).

Namun di Indonesia sendiri kerawanan pangan telah terjadi bahkan sebelum pandemi melanda, terutama di daerah terpencil dan miskin. Kini keadaan menjadi semakin parah ketika banyak lapangan kerja ditutup, terjadinya PHK secara besar-besaran, yang menyebabkan terjadinya sulitnya akses masyarakat terhadap sumber pangan diberbagai lapisan. Turunnya pendapatan masyarakat juga menyebabkan kurangnya asupan pangan serta kualitas pangan yang dikonsumsi, karena harga pangan yang sulit dijangkau serta terhambatnya pasokan pangan yang membuat harga kian melambung (SMERU Research Institute, 2020). Belum lagi jika hal tersebut

mengarah pada ancaman gizi buruk yang dialami oleh masyarakat karena terpaksa mengurangi konsumsi makanan ketika pendapatan menurun. Sehingga hal ini menjadi salah satu indikator dari belum terpenuhinya *human security* di Indonesia ketika masa pandemi.

Langkah yang diambil oleh pemerintah dalam rangka untuk melawan pandemi serta menjaga ketahanan pangan dalam waktu yang bersamaan sebenarnya telah dilakukan. Kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) merupakan alat utama dalam mencegah penyebaran virus Covid-19, yang bertujuan untuk membatasi serta mencegah terjadinya kerumunan secara parsial pada tingkat daerah. Namun hal tersebut memiliki dampak negatif bagi ketahanan pangan nasional, yakni menjadikan pasokan pangan dan medis mengalami keterlambatan distribusi yang mana membutuhkan ketepatan serta kecepatan pada masa kritis. PSBB dan ketahanan pangan merupakan variabel yang saling mempengaruhi, karena dalam masalah *supply* dan *demand* sendiri terjadi ketidakseimbangan, dimana permintaan akan harga pangan melonjak tinggi sedangkan secara *demand* sendiri tidak bisa terpenuhi secara maksimal karena terdapat peraturan tentang pembatasan kegiatan operasional yang menghambat proses distribusi.

Selain itu kebijakan lain seperti impor bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri seperti pada komoditi beras, kedelai, jagung, gula, dan daging merupakan 'alat bantu' utama bagi pemerintah dalam mewujudkan stabilitas dan ketahanan pangan nasional (Aprilianti, Amanta, & Felippa, 2020). Namun pada musim pandemi kebijakan tersebut sangatlah riskan, karena arus perdagangan internasional mengalami hambatan secara massal, dan akan membahayakan jika pemerintah sampai tidak berhasil memenuhi kebutuhannya yang berasal dari impor. Terlebih, Indonesia merupakan negara yang masih bergantung pada impor di komoditi-komoditi pokok esensial seperti yang telah disebutkan diatas. Padahal, agar dapat menghindari dampak yang tidak diinginkan sebenarnya Indonesia dapat memaksimalkan sektor domestiknya melalui pengoptimalisasian fungsi desa dalam bidang agrikultur.

Berbicara tentang masalah ketahanan pangan Indonesia dan kaitannya dengan pandemi, terdapat penelitian serupa yang menyebutkan bahwa program *Food Estate* di era Joko Widodo merupakan sebuah kegagalan sistematis yang hanya menempatkan petani sebagai korbannya. Program yang beralih 'demi pembangunan nasional' tersebut nyatanya tidak memberikan benefit positif bagi para petani kecil tersebut, alih-alih mereka justru dieksploitasi dan dirapuhkan untuk menggarap lahan yang asing bagi mereka dan tidak mendapatkan hak-hak dasar mereka seperti akses kepada sumber pangan yang bergizi dan upah yang layak. *Food Estate* yang digadang-gadang sebagai momentum reformasi sistem pangan nasional ternyata justru menyerahkan proses pengelolaan lumbung pangan kepada korporasi agrobisnis yang secara alami hanya akan mementingkan profit daripada kesejahteraan petani. Inisiasi program ini hanyalah repetisi sejarah kelam yang dilakukan di masa Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono, dimana banyak petani bernasib buruk akibat adanya kebijakan lumbung pangan (Simanjuntak, 2020).

Selain itu, pemerintah juga harus mulai menaruh perhatian terhadap sektor pertanian dari desa-desa yang ada di Indonesia. Hal tersebut menjadi penting dikarenakan selama ini Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah 80% nya difokuskan kepada pembangunan infrastruktur ketimbang sektor pertanian guna menghadapi resiko kerentanan pangan. Desa yang harusnya dapat menjadi tonggak

dari ketahanan pangan nasional ternyata hanya terdapat 2.804 BUMDes yang berfokus dibidang pertanian dari total 45.549 BUMDes yang ada di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlunya pergeseran sudut pandang dari yang hanya berorientasi pada bidang infrastruktur menuju orientasi yang lebih seimbang disemua sektor terutama pertanian (Puguh, Mujiyanto, Rivera, & Fazri, 2020).

Optimalisasi tersebut dianggap penting bagi penulis karena sejatinya Indonesia merupakan negara agraris yang seharusnya berdaulat dalam sektor agrikultur yang dimulai dari desa yang memiliki pertanian yang berdaya dan bersifat berkelanjutan (*sustainable*). Karena selama ini pemerintah dipandang hanya mementingkan ketersediaan pangan saja tanpa memperhatikan 'siapa' dan 'darimana' yang berada dibalik keterpenuhan sumber pangan tersebut. Maka dari itu, penulis mengangkat topik ini karena ketahanan pangan dipandang sebagai isu yang 'berada disekitar kita' namun ternyata hal tersebut tidak memiliki simplifikasi seperti yang dibayangkan. Terdapat kompleksitas dibalik terciptanya ketahanan pangan, dan terlebih momentum pandemi ini seharusnya dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk lebih 'optimis' pada sektor lokal dan domestik dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional dengan menempatkan desa sebagai salah satu aktor utama.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis merumuskan sebuah rumusan masalah yakni "*bagaimana penguatan sektor agrikultur desa dapat menjadi solusi ketahanan pangan Indonesia di masa pandemi?*". Selain itu tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana seharusnya pemerintah dapat mengoptimalisasi desa dari sisi kebijakan demi tercapainya kedaulatan pangan di sektor agrikultur, dan menjadikannya sebagai strategi alternatif yang memiliki signifikansi tinggi dalam masa pandemi.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan cara pendekatan evaluatif yang didasarkan pada data dan juga studi literatur. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, penelitian dengan metode ini bertujuan untuk melihat perilaku orang, peristiwa lapangan, serta kegiatan-kegiatan tertentu secara terperinci dan mendalam. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian sekedar untuk menggambarkan suatu variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel (Faisal, 1992). Sedangkan pengertian dari metode kualitatif sendiri adalah metode yang penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono, 2008). Studi literatur dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber, seperti jurnal nasional dan internasional, buku, portal berita online ataupun website yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diangkat dan dibahas oleh penulis. Pengambilan sumber informasi yang dilakukan oleh penulis menggunakan sumber yang memiliki kredibilitas tinggi dan juga ke-validan data sebagaimana mestinya. Beberapa jurnal nasional yang penulis jadikan referensi adalah jurnal yang sudah terindeks oleh SINTA. Untuk jurnal internasional, penulis mengambil dari berbagai portal jurnal yang terindeks Scopus atau yang memiliki tingkat sitasi yang tinggi. Pengambilan berita online yang

dilakukan penulis diperoleh dari berbagai portal, dari berita nasional hingga internasional.

3. Hasil dan Pembahasan

Desa yang ada di Indonesia merupakan kunci utama penguatan ketahanan pangan nasional. Indonesia sebagai negara agraris memiliki arti bahwa negara memiliki potensi kekuatan pertanian yang besar. Daerah pedesaan yang banyak dan berpotensi menjadikan sebuah aset yang berharga untuk menopang kebutuhan pangan nasional. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pernah menyatakan bahwasanya terdapat 82% dari pedesaan Indonesia yang masih bergantung pada pertanian dengan sebagian sektor peternakan dan perikanan di dalamnya (Hartik, 2017). Hal ini menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki banyak akses akan pertanian yang dapat dimaksimalkan demi peningkatan ketahanan pangan. Akan tetapi, optimalisasi yang kurang masih menjadi hambatan di dalamnya karena faktor ekonomi dan teknis. Pada akhirnya hal ini berujung pada rendahnya daya saing produk agrikultur hingga rendahnya ketahanan pangan nasional (Bantacut, 2014).

Presiden Joko Widodo menjalankan program *Food Estate* sebagai salah satu upaya preventif krisis pangan dalam Proram Strategis Nasional (PSN) pada masa pandemi seperti apa yang menjadi peringatan FAO bahwa akan adanya kemungkinan terjadinya krisis pangan global yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2020). Jika melihat kebelakang, program food estate ini adalah sebuah pengembangan pangan yang telah terintegrasi dengan pertanian, perkebunan, dan peternakan yang ada didalam suatu kawasan. Sampai saat ini, ada tiga provinsi yang tengah menjalankan food estate, yakni, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan NTT. *Food estate* sebenarnya sudah dirancang dan juga digaungkan dari tahun 1939 sampai era Joko Widodo. Tetapi, program ini kurang berjalan maksimal pada era SBY, dimana ditemukan 20.000 ton beras Bulog yang telah rusak. Menurut Bustar Maitar, yang merupakan pendiri dari Yayasan Ekosistem Nusantara Berkelanjutan berpendapat jika food estate memang harus dikembangkan dan berbasis di pedesaan (Waseso, 2021).

Dinas Pertanian menjelaskan bahwa pertanian yang bersifat berkelanjutan merupakan pertanian yang memiliki peneglolaan sumber daya yang tak hanya berhasil dalam produksi pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun praktiknya juga harus mampu melestarikan sumber daya alam yang ada (Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Buleleng, 2019). Konsep ini bertumpu pada tiga dimensi berkelanjutan, yakni (Huda, 2021):

A. *Planet* (lingkungan)

Bagaimana sumber daya alam yang dimiliki dapat dikelola secara bijak agar tetap eksis untuk generasi mendatang. *Food estate* yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo merupakan sebuah langkah yang baik untuk meningkatkan tingkat produktivitas agrikultur di Indonesia. Akan tetapi, pertanian tersebut belum dilakukan secara berkelanjutan yang malah menjadikannya masih rentan akan berbagai hal di masa depan. Beberapa dampak yang dapat dirasakan antara lain (Surahman, Soni, & Shivakoti, 2017):

- Lahan gambut merupakan lahan yang kurang agronomis untuk pertanian masif di Indonesia. Hal ini dikarenakan hanya sebagian kecil lahan gambut yang dapat digunakan sebagai lahan pertanian.
- Lahan gambut mengandung tingkat karbon yang tinggi sekali yang menjadikannya rentan untuk terbakar dan berdampak pada banjir dan kekeringan daerah.

Ancaman akan berbagai dampak yang ada menjadikan pemerintah untuk benar-benar optimal dalam pemanfaatannya. Pemerintah harus menggunakan lahan gambut yang memiliki kedalaman kurang dari 3 meter. Area dengan kedalaman tersebut dan selebihnya harus segera ditetapkan sebagai kawasan konservasi atau kawasan lindung pada kawasan eks PLG tersebut maupun lahan gambut lainnya. Penetapan ini ditujukan untuk menjaga tata air dan juga kadar karbon yang tersimpan di dalamnya. Pembukaan lahan dalam kedalaman ini juga akan semakin meningkatkan kerentanan akan kebakaran hutan pada musim kemarau dan banjir pada musim penghujan. Pembukaan tersebut juga menghilangkan lahan penyerap emisi karbon yang dapat meningkatkan ancaman perubahan iklim (Mawardi, 2007).

Implementasi pertanian yang berkelanjutan (*sustainable farming*) diperlukan dalam rangka menghadapi permasalahan akan ancaman perubahan iklim selain untuk pemenuhan kebutuhan ketahanan pangan. Maka daripada itu, gaya atau metode pertanian yang berkelanjutan diperlukan dalam rangka menjaga sumber daya yang ada untuk dapat tetap tersedia bagi generasi yang akan datang. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan metode *crop rotation*. Metode ini dilakukan dengan cara menanam berbagai jenis tanaman dengan berkala, yakni tidak hanya menggilir namun juga merotasi waktu penanaman tiap jenis tanaman pada lahan pertanian. Metode ini pada akhirnya dapat menyuguhkan beberapa keuntungan, yaitu (Food and Agriculture Organization of The United Nations, 2019):

- Tanah akan tidak mudah jenuh dan akan terus produktif. Dengan terjaganya produktivitas tanah, hal seperti ini dapat menghindarkan pembukaan lahan berlebih dengan alasan berhentinya produktivitas lahan.
- Tingkat keragaman produksi pangan menjadi lebih beragam yang dapat menjadi sumber nutrisi yang lebih baik dan seimbang bagi masyarakat.
- Lebih baiknya distribusi kanal perairan dan biopori oleh berbagai jenis akar tanaman yang menjadikan lahan semakin baik kualitasnya untuk memanen. Distribusi air menjadi sangat baik di dalam tanah dan juga kandungan tanahnya baik unsur organik maupun mineral.
- Pembentukan humus juga menjadi lebih baik dengan adanya implementasi metode pertanian seperti ini.

B. *Profit* (Keuntungan Ekonomi):

Pilar ini menekankan pada bagaimana praktik ekonomi oleh baik para pelaku bisnis maupun pemerintah dapat beroperasi secara bertanggungjawab dalam memperoleh keuntungan. Praktik upaya penguatan ketahanan pangan yang disertai dengan penggalakan penjualan produk domestik dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi berbagai pihak. Para petani dapat lebih merasakan keuntungan dari hasil panen mereka yang lebih aktif lagi setelah menurun pada masa pandemi. Kemudian, pemerintah dapat mendapatkan keuntungan untuk mengurangi biaya impor beras. Selain itu, sektor agrikultur dapat semakin menguat dan mengalami peningkatan

produksi yang dapat membuka peluang ekspor produk pertanian dimana hal tersebut mampu memberikan keuntungan ekonomi negara. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian oleh Kementerian Pertanian menyatakan bahwa masa pandemi memberikan banyak peluang bagi sektor pertanian dikarenakan adanya pergeseran minat konsumen. Konsumen yang sebelumnya cenderung berbelanja produk yang bersifat keinginan (*wants*) bergeser menuju produk yang bersifat kebutuhan (*needs*) seperti kebutuhan pokok dimana minat produk pertanian berpotensi untuk lebih meningkat (Ashari, 2020). Kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan produk pertanian domestik dalam pasar yang dapat memberi keuntungan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Selain itu, harus ada upaya revitalisasi lahan terlebih dahulu dengan menggunakan berbagai pupuk dan teknologi sebelum bertani agar lahan benar-benar subur dan menghasilkan kebutuhan pangan yang optimal dan bergizi. Hal ini menjadikannya penting untuk dikelola dengan tepat sebelum digunakan untuk pertanian dan dipertimbangkan akan dampak berkelanjutannya terkait bencana alam. Keperluan untuk merevitalisasi lahan tidaklah memerlukan biaya dan waktu yang sedikit dimana hal ini menjadikannya kurang efisien. Kawasan eks PLG yang digunakan dalam program *food estate* ini sangat rusak yang luasnya pun mencapai 36.936 Ha semakin menjadikan negara harus menyiapkan dana yang sangat besar untuk revitalisasinya (Greeners.co, 2020). Oleh karena itu, sembari menunggu revitalisasi tersebut, sebaiknya pemerintah mengutamakan optimalisasi desa yang melimpah dan sudah siap untuk diberdayakan lebih lanjut.

C. *People* (Kesejahteraan Masyarakat):

Pilar ini menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, khususnya mempersempit kesenjangan di masyarakat. Dengan upaya fokus optimalisasi petani desa, maka kesejahteraan petani yang sejauh ini kurang diberdayakan dapat membaik. Mereka akan mendapatkan kesempatan untuk lebih berkembang dengan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah. Pengoptimalan sektor pertanian di desa ini dapat menjadikan proses penggendutan lumbung pangan nasional menjadi lebih efisien dan juga tetap bergizi untuk masyarakat karena lahannya yang memang cocok untuk pertanian, tidak seperti lahan eks PLG yang hendak digunakan oleh pemerintah. Hal ini semakin didukung oleh pendapat ahli yang menyatakan bahwa lahan eks PLG merupakan lahan yang telah mengalami degradasi tinggi dimana menjadikannya lahan suboptimal dengan kesuburan yang rendah. Selain itu, lahan eks PLG tersebut merupakan lahan yang sangat rapuh menjadikannya harus berhati-hati dalam pengelolaannya (AgroIndonesia, 2020). Ancaman akan bencana lingkungan yang menyertai juga seharusnya menjadi pertimbangan akan pemerintah Indonesia dimana masalah lingkungan ke depannya hanya akan semakin mengancam kesejahteraan masyarakat walaupun peningkatan stok lumbung pangan tercapai.

Dari berbagai manfaat yang ada, dapat dilihat bahwasanya metode berkelanjutan seperti ini dapat berdampak lebih besar tak hanya dalam pertanian namun juga lingkungan. Selain menyuguhkan hasil panen yang berkualitas, lingkungan akan dapat lebih terjaga kualitasnya sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama serta berkelanjutan.

Pemfokusan optimisasi sektor pertanian di desa dengan menggalakkan implementasi *sustainable farming* pada masa pandemi tak lepas dari berbagai kelebihan dan

kekurangan. Petani desa sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakan pertanian. Sumber daya sektor pertanian desa sudah memiliki sumber daya yang cukup "*powerful*" tak hanya dari segi kemampuan, namun juga lahan yang mendukung (Mege, Werdani, Kurniawati, & Kholidin, 2020). Para petani tidak perlu lagi diedukasi dan juga pelaksanaan optimalisasi pertanian agrikultur tidak perlu lagi dimulai dari nol. Hal ini tentunya menguntungkan untuk mewujudkan implementasi *sustainable farming* di masa pandemi. Dengan sudah adanya kemampuan untuk bertani, petani hanya perlu lebih diarahkan dan didukung untuk mewujudkan implementasi *sustainable farming*. Lahan di desa juga lebih subur dibandingkan dengan lahan eks PLG yang dapat berujung pada produksi pangan yang lebih berkualitas untuk dikonsumsi masyarakat.

Kurangnya edukasi tentang perkembangan teknologi ternyata menjadi salah satu kendala petani desa untuk bisa memaksimalkan potensi ladang pertaniannya. Selain itu, banyaknya kendala ekonomi yang terjadi di masa pandemi berdampak pada fenomena gulung tikar oleh berbagai pihak, termasuk petani yang merugi. Terdapat dua skenario penyebab kerugian yang dialami oleh para petani di masa pandemic. Pertama, adanya pembatasan sosial yang diberlakukan selama pandemi menghambat distribusi produk petani. Hal ini menyebabkan banyaknya hasil tani yang tidak dapat terdistribusi dan pada akhirnya terbuang. Kedua, terhambatnya distribusi tidak hanya menghambat proses penyaluran hasil tani. Distribusi pupuk dan pasokan pendukung pertanian juga terhambat (Darwis, Maulana, & Rachmawati, 2020). Hal tersebut pada akhirnya berdampak pada aktivitas pertanian yang kurang maksimal.

Kurang tereksposnya petani desa dengan teknologi juga menjadi kendala lainnya dalam pengembangan pertanian di desa menjadikan mereka memiliki kendala pengetahuan terkait hal tersebut. Kapasitas petani yang kurang ditingkatkan juga menjadi ancaman akan berjalannya *food estate* secara optimal. Hal ini diprediksikan dapat mengulang kegagalan pada upaya *food estate* sebelumnya yang dilakukan di lahan yang sama (Pantau Gambut, 2020).

Kurangnya minat dari generasi muda untuk bekerja dan mengolah lahan pertanian menjadi salah satu masalah bagi keberlangsungan pertanian di Indonesia. Mereka cenderung berpikir bahwa bekerja dalam sektor pertanian kurang 'menggiurkan' jika dibandingkan apabila mereka bekerja dalam sektor perusahaan. Data yang ada menunjukkan kontribusi sektor pertanian yang memang cukup besar terhadap GDP, yakni sebesar 12-13%. Namun, persentase kontribusinya terkait kesempatan kerja hanya sekitar 30%. Persentase ini menjadikan pendapatan yang hanya berkisar 13% itu harus dibagi dengan 30% tersebut. Tingkat kesejahteraan yang rendah ini menyuguhkan daya tarik yang rendah terhadap generasi muda (Siregar, 2019).

Dari berbagai tantangan yang ada menjadikan dukungan pemerintah yang disertai dengan komitmen jangka panjang untuk optimalisasi sektor pertanian desa menjadi penting untuk mengurangi berbagai poin kekurangan. Relaksasi kredit yang disertai dengan pengenalan teknologi dan pelatihan pertanian berkelanjutan untuk memudahkan para petani untuk segera mengimplementasikannya dalam rangkaian kegiatan tani mereka tanpa harus mengeluarkan beban modal awal yang terlalu tinggi. Selain itu, pemerintah juga dapat membantu menggalakkan kerjasama berbagai pihak untuk mendukung agrikultur Indonesia seperti menggandeng berbagai NGO dan juga lembaga lainnya seperti BUMP. Dengan saling mendukung satu sama lain, maka optimalisasi pertanian desa tidak hanya dapat mewujudkan ketahanan pangan.

Keuntungan ekonomi juga dapat dicapai dengan berkembangnya pemasukan dan keberdayaan agrikultur. Optimalisasi praktik berkelanjutan yang disertai dengan peningkatan konektivitas dan distribusi juga dapat memotivasi petani untuk terus mengimplementasi praktik tersebut. Semakin berkembangnya pertanian nasional, semakin tinggi pula potensi untuk menarik minat masyarakat untuk bekerja dalam sektor pertanian, khususnya pemuda. Jika implementasi *food estate* di lahan eks PLG terus dilanjutkan dengan banyaknya proyeksi kerusakan dan kurangnya kualitas pangan yang dihasilkan sebagai dampaknya, maka hal tersebut tidak akan dapat menguntungkan kesejahteraan petani secara jangka panjang dan dapat semakin memperparah permasalahan regenerasi petani di Indonesia.

Mempromosikan '*sustainable life style*' di antara para petani seperti ini juga dapat mempromosikan *outcome* lebih besar lagi, yakni dari peningkatan produktivitas pangan domestik dapat menjadikan konsumsi masyarakat lebih berputar pada produk-produk pertanian domestik. Hal ini menjadikan pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak harus mengandalkan banyak sekali produk pangan impor seperti sebelumnya. Kegiatan impor pangan seperti inilah yang menjadikan ketahanan pangan nasional menjadi rentan karena kurangnya kemandirian dalam pemasokan pangan. Ketergantungan pada pangan impor Indonesia berada pada tingkat yang cukup besar yang bahkan Indonesia harus tetap melakukan impor beras dari negara lain. Padahal, Indonesia merupakan negara yang berkemampuan menghasilkan jumlah beras yang besar. Hal ini disebabkan karena kurang optimalnya penyerapan hasil pertanian beras oleh Bulog dan pengelolaan pertanian (Paipan & Abrar, 2020).

Dengan adanya peningkatan ketahanan dari hasil optimalisasi potensi desa di Indonesia, maka biaya impor pangan dapat ditekan. Sisa biaya tersebut nantinya dapat dialihkan kepada berbagai sektor penunjang kesejahteraan masyarakat, yakni seperti pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya. Namun, sektor pertanian masih menjadi prioritas untuk menjamin optimalisasi sektor seperti melalui penyediaan pupuk dan teknologi penunjang pertanian. Dimulai dari perubahan gaya pertanian menjadi berkelanjutan dan optimal hingga mewujudkan pemenuhan kebutuhan pangan yang lebih mandiri, pada akhirnya dapat berimplikasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih menyeluruh.

4. Kesimpulan

Upaya pemanfaatan lahan eks PLG di Kalimantan Tengah merupakan ideasi yang bagus sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan Indonesia. Akan tetapi, pemerintah seharusnya lebih mengoptimalkan aset pertanian pedesaan terlebih dahulu yang masih kurang diimplementasikan. Padahal, potensi desa Indonesia sangatlah tinggi untuk penguatan ketahanan pangan dan penggendutan lumbung pangan nasional. Kurang efektif dan efisiennya pemanfaatan lahan eks PLG karena harus melalui proses yang panjang agar hasilnya optimal hanya akan menjadikan Indonesia lamban untuk kesiapan menghadapi krisis pangan dunia. Ancaman akan bencana alam, peningkatan dampak perubahan iklim, juga lemahnya kualitas pangan yang dihasilkan juga hanya akan mengancam kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi desa dengan pemberdayaan metode *crop rotation* dapat menyuguhkan perubahan yang signifikan akan penguatan pangan melalui produksi berkualitas. Metode ini juga

merupakan praktik pertanian berkelanjutan yang dapat membantu pemerintah menekan dampak perubahan iklim yang mengancam. Optimalisasi ini juga pada akhirnya dapat membantu menekan ketergantungan impor pangan yang mana biaya impor sebelumnya dapat dialihkan kepada sektor penunjang kesejahteraan lainnya. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa *sustainable farming* melalui optimalisasi desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- AgroIndonesia. (2020). 'Food Estate' Kalteng Optimalkan Lahan Eks PLG. Retrieved Februari 5, 2021, from <http://agroindonesia.co.id/2020/07/food-estate-kalteng-optimalkan-lahan-eks-plg/>
- Aprilianti, I., Amanta, & Felippa. (2020). *Indonesian Food Trade Policy during Covid-19: Ringkasan Kebijakan*. Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies.
- Ashari. (2020, Agustus 4). *Peluang Bisnis Pertanian pada Masa Pandemi dan Era New Normal*. Retrieved from PSE Litbang Kementerian Pertanian: <https://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/covid-19/opini/463-peluang-bisnis-pertanian-pada-masa-pandemi-dan-era-new-normal.html?limitstart=0>
- Bantacut, T. (2014). Agenda Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan 2014-2019. *Jurnal Pangan*, 23(3), 278-295.
- BPK RI. (2012, November 17). *Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan*. Retrieved Februari 6, 2021, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39100>
- Darwis, V., Maulana, M., & Rachmawati, R. R. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Nilai Tukar Petani Dan Nilai Tukar Usaha Pertanian. In A. Suryana, *Dampak Pandemi Covid-19: Perspektif Adaptasi dan Resiliensi Sosial Ekonomi Pertanian* (pp. 83-103). Jakarta: IIARD Press.
- Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Buleleng. (2019, Oktober 28). *Pengertian dan Konsep Pertanian Berkelanjutan*. Retrieved from Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Buleleng: <https://distan.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-dan-konsep-pertanian-berkelanjutan-22>
- Faisal, S. (1992). *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta:: Rajawali Press.
- Food and Agriculture Organization of The United Nations. (2019, Agustus 21). *Conservation Agriculture*. Retrieved Februari 3, 2021, from Food and Agriculture Organization of The United Nations: <http://www.fao.org/conservation-agriculture/in-practice/species-diversification/en/>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2020). *Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Addressing the Impacts of COVID-19 in Food Crises April–December 2020*. Roma: FAO.

- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2020). *FAO-WFP Early Warning Analysis of Acute Food Insecurity Hotspots October 2020*. Roma: FAO.
- Greeners.co. (2020). *Program Cetak Sawah Berpotensi Meningkatkan Kerawanan Karhutla*. Retrieved Februari 5, 2021, from Greeners.co: <https://www.greeners.co/berita/program-pencetakan-sawah-berpotensi-meningkatkan-kerawanan-karhutla/>
- Hartik, A. (2017). *82 Persen Desa di Indonesia Masih Andalkan Sektor Pertanian, diakses dalam* . Retrieved Februari 6, 2021, from <https://regional.kompas.com/read/2017/01/19/12010031/82.persen.desa.di.indonesia.masih.andalkan.sektor.pertanian>
- Huda, Z. (2021, Mei 6). *The 3 Pillars of Sustainability: What Are They and Why Do They Matter?* Retrieved from Planet Shine: <https://planetshine.com/3-pillars-of-sustainability/>
- Maharani, D. C. (2016). Mencapai Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan. *Global & Policy*, 73-83.
- Mawardi, I. (2007). Rehabilitasi dan revitalisasi Eks Proyek Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 8(3), 287-297.
- Mege, S. R., Werdani, R. E., Kurniawati, N. I., & Kholidin. (2020). Model Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Lokal Berkelanjutan pada Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 954-962.
- Paipan, S., & Abrar, M. (2020). Determinan Ketergantungan Impor Beras di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Politik*, 11(1).
- Pantau Gambut. (2020). *Food Estate Kalimantan Tengah, Kebijakan Instan Sarat Kontroversi* . Jakarta: Pantau Gambut.
- Puguh, D., Mujiyanto, Rivera, M., & Fazri, M. (2020). *COVID-19: Menakar Ketahanan*. Jakarta: Kementerian Desa PDTT.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2020, April 4). *Menhan Siap Dukung 'Food Estate' dan Hadapi Krisis Pangan Dunia Akibat Pandemi*. Retrieved Februari 6, 2021, from Sekretariat Kabinet Republik Indonesia: <https://setkab.go.id/menhan-siap-dukung-food-estate-dan-hadapi-krisis-pangan-dunia-akibat-pandemi/>
- Shalihah, N. F. (2020). *Mengenal Food Estate, Program Pemerintah yang Disebut Dapat Meningkatkan Ketahanan Pangan*. Retrieved Februari 6, 2021, from <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/09/183800365/mengenal-food-estate-program-pemerintah-yang-disebut-dapat-meningkatkan?>
- Simanjuntak, A. H. (2020). Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan pada Masa Pandemi Covid-19: Telaah Kritis terhadap Rencana Megaprojek Lumbung Pangan Nasional. *Sosio Informa*, 184-204.
- Siregar, E. (2019, November 15). *RI Terancam Krisis Petani: Orang Jadi Petani karena Terpaksa!* Retrieved from CNBC Indonesia:

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20191115203453-4-115724/ri-terancam-krisis-petani-orang-jadi-petani-karena-terpaksa>

SMERU Research Institute. (2020). *Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia: Informasi Terkini 2019–2020*. Jakarta: Smeru.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Surahman, A., Soni, P., & Shivakoti, G. P. (2017). Are Peatlands Farming Systems Sustainable? Case Study on Assessing Existing Farming Systems in the Peatland of Central Kalimantan, Indonesia. *Journal of Integrative Environmental Sciences*, 15(1).

Waseso, R. (2021, Juli 22). *Pemerintah diminta evaluasi menyeluruh soal pelaksanaan program food estate*. Retrieved from Kontan: <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-diminta-evaluasi-menyeluruh-soal-pelaksanaan-program-food-estate?page=all>

Yulawati. (2020). *Jokowi Waspadai Krisis Pangan, Ini Peringatan FAO saat Pandemi Corona*. Retrieved Februari 4, 2021, from <https://katadata.co.id/yulawati/berita/5e9a41c99400f/jokowi-waspadai-krisis-pangan-ini-peringatan-fao-saat-pandemi-corona>